



Perkebunan Nusantara

LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
TAHUN 2022



OPTIMALISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI
PPID HOLDING PERKEBUNAN NUSANTARA

“Transparansi, Akuntabilitas, dan Perlindungan Informasi dalam Meningkatkan Kepuasan Publik”

Daftar Isi

- 2** Daftar Isi
- 2** Daftar Gambar
- 2** Daftar Tabel
- 2** Daftar Grafik
- 3** Kata Pengantar
- 5** Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik
- 12** Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
- 15** Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik
- 20** Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik
- 21** Layanan Informasi Publik Selama Tahun 2022
- 34** Program Kerja Tahun 2022
- 35** Kendala Pengelolaan Layanan Informasi Publik
- 36** Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Daftar Gambar

- 7** Gambar 1. Struktur PPID Holding Perkebunan Nusantara
- 13** Gambar 2. Situs website PPID yang menampilkan informasi PPID Perusahaan
- 13** Gambar 3. Area layanan informasi publik
- 16** Gambar 4. Workshop komunikasi publik PTPN Holding
- 17** Gambar 5. Aktivasi program BUMN Muda Perkebunan & Social Media Ranger PTPN Group
- 17** Gambar 6. Program Millennials Ber-AKHLAK Bootcamp
- 22** Gambar 7. Rapat koordinasi penyusunan Daftar Informasi Publik
- 25** Gambar 8. Akun Instagram Holding
- 26** Gambar 9. Konten terkait gambaran RKAP perusahaan tahun 2022
- 26** Gambar 10. Informasi terkait transformasi EBITDA perusahaan secara berkala

- 27** Gambar 11. Konten terkait perkembangan kinerja perusahaan
- 27** Gambar 12. Informasi serta merta terkait rekrutmen perusahaan
- 28** Gambar 13. Konten terkait implementasi Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) dan akses pelaporan bagi publik
- 28** Gambar 14. Informasi serta merta penatausahaan program Pendanaan UMK terkait Angsuran Belum Teridentifikasi
- 29** Gambar 15. Informasi penyaluran program TJSL secara berkala

Daftar Tabel

- 23** Tabel 1. Daftar jenis permintaan informasi selama tahun 2022

Daftar Grafik dan Diagram

- 22** Grafik 1. Jenis informasi yang diminta tahun 2022
- 23** Diagram 1. Jenis informasi yang diminta tahun 2022



KATA PENGANTAR

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau disebut juga Holding Perkebunan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, kakao, tembakau, dan aneka tanaman lainnya. Sebagai sebuah perusahaan BUMN, Holding Perkebunan Nusantara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap informasi publik yang berkaitan dengan perusahaan kepada masyarakat luas.

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan/proporsional, cara sederhana, pengecualian bersifat ketat

dan terbatas, serta kewajiban Badan Publik untuk meningkatkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden RI Joko Widodo bahwa BUMN perlu bertransformasi, Menteri BUMN melakukan transformasi di sejumlah perusahaan BUMN, termasuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam mendukung proses transformasi yang dilakukan. Oleh karena itu, Laporan Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu cara untuk mendorong terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik Holding Perkebunan Nusantara ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.





GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada era digital seperti saat ini, informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi banyak pihak, termasuk Holding Perkebunan Nusantara. Sebagai holding yang memiliki beberapa unit bisnis dalam industri perkebunan, perusahaan memiliki beragam informasi yang harus dikelola dan disampaikan ke berbagai pihak seperti stakeholder dan masyarakat luas. Oleh karena itu, dibutuhkan layanan informasi yang baik dan terintegrasi yang dapat memudahkan akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Sejalan dengan perkembangan digital dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang real-time, maka PPID juga dituntut untuk dapat menciptakan ekosistem layanan informasi publik yang cepat dan efisien. Saat ini Holding Perkebunan Nusantara mengoptimalkan dan mengintegrasikan asset digital seperti website, email PPID, dan

edia sosial sebagai sarana untuk mengedukasi sekaligus menyediakan konten-konten keterbukaan informasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain bertujuan agar penyelenggaraan negara dapat diawasi oleh publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik semakin tinggi. Keterlibatan tersebut pada akhirnya akan menghasilkan penyelenggaraan negara yang lebih berkualitas. Partisipasi seperti itu menghendaki adanya jaminan terhadap keterbukaan informasi publik. Sebagai salah satu Badan Publik, Holding Perkebunan Nusantara berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan layanan



Informasi berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Tata Kelola PPID di lingkungan Holding Perkebunan Nusantara berpedoman pada Piagam Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan pada Mei 2019. Saat ini, perusahaan tengah melakukan pembaharuan piagam tersebut menjadi Pedoman Layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam rangka mendukung program-program komunikasi digital, perusahaan juga secara aktif melibatkan generasi muda atau Milenial dari berbagai bidang di internal. Melalui program Social Media Ranger yang digagas oleh Kementerian BUMN, konten-konten terkait keterbukaan informasi dapat digaungkan dengan masif dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Secara umum, penyelenggaraan layanan informasi publik di Holding Perkebunan Nusantara didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

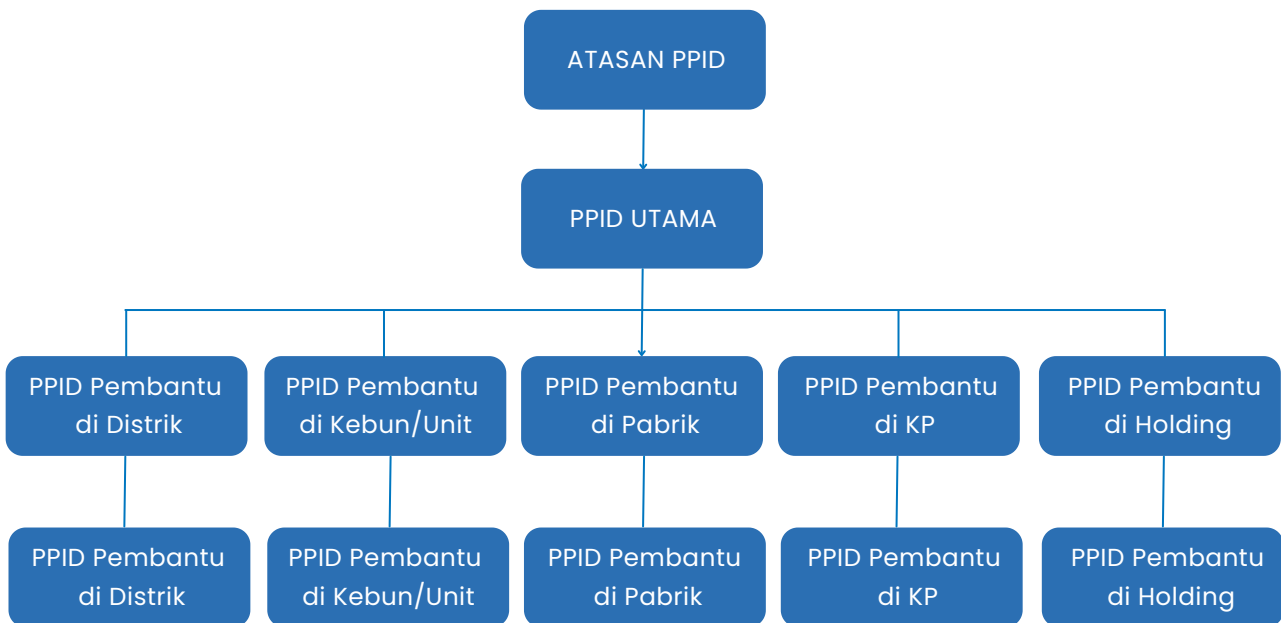
1. Transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan Informasi Publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan layanan informasi publik, Holding Perkebunan Nusantara didukung oleh perangkat PPID sebagai berikut:





Gambar 1. Struktur PPID Holding Perkebunan Nusantara

Keterangan:

1. **Atasan PPID** adalah Direktur SDM
2. **PPID Utama** adalah Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan.
3. **PPID Pembantu** adalah General Manager, Kepala Divisi selain Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan, Kabag selain Kepala Biro Sekretariat Perusahaan, Manajer, dan Kepala Unit di lingkungan PTPN III (Persero).
4. **PPID** adalah pejabat atau yang oleh karena jabatannya ditunjuk membantu
5. **PPID**

Dalam pelaksanaannya, PPID senantiasa berkoordinasi dalam dengan divisi atau unit kerja yang membidangi hukum khususnya, dalam hal pertimbangan informasi. Hal ini tidak lain adalah supaya dalam pengambilan keputusan senantiasa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu tentunya dengan seluruh unit kerja pemilik informasi yang memahami proses bisnis dan konten informasi itu sendiri. Koordinasi yang intensif ini memudahkan dan mempercepat proses tindak lanjut permintaan informasi.

Pembentukan PPID diawali dengan pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan layanan informasi sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kesanggupan tersebut tertuang dalam maklumat visi berikut ini.



Maklumat Pelayanan Informasi Publik

1. Mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan informasi publik yang benar, tepat waktu, dan bisa dipertanggungjawabkan;
3. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja secara berkelanjutan.

Harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan beserta strategi untuk mewujudkannya tertuang dalam visi dan misi PPID berikut ini.

VISI

“Menjadi Badan Usaha Milik Negara yang memiliki, memproduksi, mengelola dan mempublikasikan informasi publik yang dikuasai guna menciptakan pelayanan informasi terbaik dan menjadi nilai tambah perusahaan.”

MISI

Menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana kepada pemohon informasi.



PPID Pembantu di Kantor Cabang

PPID Pembantu melaksanakan fungsinya sebagai pendukung PPID Utama atau Pusat dan dijabat oleh General Manager, Kepala Divisi selain Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kabag selain Kepala Biro Sekretaris Perusahaan, Manajer, dan Kepala Unit di lingkungan perusahaan.

Secara umum, PPID Pembantu bertanggung jawab dalam hal:

Penyiapan informasi Unit Kerja;

- a. Ketersediaan laporan secara periodik dan tahunan;
- b. Ketersediaan informasi melalui berbagai sarana informasi;
- c. Kewajiban mengumumkan informasi jika terjadi informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- d. Penyampaian tanggapan tertulis terhadap setiap permohonan informasi publik.

Dengan struktur organisasi Holding Perkebunan Nusantara yang cukup kompleks, upaya standarisasi layanan informasi publik terus dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Direksi Nomor: 3.00/SE/02/2016 tanggal 1 April 2016 perihal Publikasi Data Perusahaan yang kemudian diperbaharui dalam bentuk Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan perusahaan. Adapun Surat Edaran tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai perusahaan, demikian juga dengan pembaharuannya nanti.

Selain pemenuhan dan penyempurnaan tata kelola PPID, perusahaan juga berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan

informasi publik melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola PPID. Kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah "Workshop Komunikasi Publik PTPN" yang bertujuan untuk lebih memahami anatomi media-media mainstream maupun media sosial dengan kondisi kekinian, dengan melibatkan seluruh jajaran Humas atau Komunikasi di perusahaan.

Sebagai perusahaan holding perkebunan, perusahaan memiliki strategi dalam mendukung narasi perusahaan, yakni merupakan cerita atau pesan yang ingin disampaikan tentang nilai-nilai, tujuan, dan budaya perusahaan kepada masyarakat. Dalam hal ini, PPID berperan penting dalam mendukung upaya pengembangan narasi yang diantaranya mencakup:

1. Penciptaan Brand Awareness yang Kuat

Holding Perkebunan berupaya membangun brand awareness yang kuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perusahaan. Terlebih perusahaan juga dalam masa transformasi yang perlu untuk disampaikan perkembangannya secara berkala.

2. Hubungan yang baik dengan Stakeholder

Holding Perkebunan menjalin hubungan baik dengan stakeholder, seperti pemerintah, mitra bisnis, dan masyarakat dengan membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat kepercayaan. Dengan demikian, dapat



memperkuat narasi perusahaan dan meningkatkan dukungan dari stakeholder untuk aktivitas perusahaan.

3. Pengembangan Program Corporate Social Responsibility

Holding Perkebunan mengembangkan program CSR yang sesuai dengan narasi perusahaan. Beberapa kegiatan diantaranya untuk mendukung lingkungan, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan sosial lainnya.

4. Kemitraan dengan Media

Holding Perkebunan telah menjalin kemitraan dengan media untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Kemitraan ini salah satunya berupa kerja sama dalam mempublikasikan informasi tentang aksi-aksi korporasi yang berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan sektor-sektor yang lainnya. Dengan menjalin kemitraan, perusahaan dapat memperluas jangkauan pesan.

PPID Holding Perkebunan berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan, berkolaborasi, dan berinovasi dengan tetap memperhatikan kebutuhan publik akan informasi. Dengan sumber daya dan aset digital yang dimiliki, PPID percaya akan mampu mengikuti perkembangan layanan informasi berbasis teknologi untuk mendukung narasi dan tujuan perusahaan secara umum.







SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai salah satu Badan Publik, Holding Perkebunan berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan menyediakan berbagai sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan efisien.

Salah satu sarana yang disediakan adalah website resmi perusahaan yang dapat diakses pada alamat <https://holding-perkebunan.com/>. Website ini merupakan sumber informasi utama dan terpercaya bagi masyarakat mengenai berbagai hal terkait dengan perusahaan seperti profil, kebijakan, program kerja, dan proyek yang sedang dilaksanakan. Website tersebut juga memuat informasi terkait PPID dengan alamat <https://holding-perkebunan.com/informasi-publik/>.

Masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen publik seperti laporan tahunan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan.

Apabila publik ingin mengajukan permohonan informasi yang belum tersedia pada website secara online, maka cukup mengisi formulir yang tersedia di pada link ptpn.group/permohonanPPID. Setelah melengkapinya, pemohon hanya cukup menunggu tindak lanjut atau jawaban dari PPID perusahaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.



Gambar 2. Situs website yang menampilkan PPID perusahaan

Bagi Pemohon yang ingin mengajukan informasi secara langsung ke perusahaan juga disediakan ruang atau area khusus layanan informasi yang berlokasi lobi perkantoran di alamat berikut :

Kantor Holding Jakarta Gedung Agro Plaza Lt. 15,
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No.1, Setia Budi,
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (+62-21) 29183300
Fax: (+62-21) 5203030

Waktu Layanan Informasi :

Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 – 17.00 WIB
Jumat : Pukul 08.00 – 12.00 WIB

Ruang layanan informasi yang tersedia dilengkapi dengan Petugas Pelayanan Informasi yang siap melayani Pemohon serta fasilitas pendukung formulir permohonan, komputer, dan lain-lain. Layanan informasi publik dengan tatap muka ditahun 2022 masih tetap menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Layanan tatap muka dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, serta menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.



Gambar 3. Area Layanan Informasi Publik



Selain itu, Holding Perkebunan Nusantara juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan dialog interaktif dengan masyarakat dan customer secara rutin. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai program atau proyek yang sedang dilaksanakan oleh perusahaan, serta untuk menerima masukan dan kritik yang dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan perusahaan.





SUMBER DAYA MANUSIA

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keberhasilan penyelenggaraan layanan informasi publik tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan teknologi yang digunakan, tetapi juga pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelolanya. SDM yang terampil dan berpengetahuan luas sangat penting karena mereka bertanggung jawab untuk mengelola sistem informasi dan memberikan layanan informasi yang akurat, andal, dan tepat waktu. Keterampilan mereka dalam hal teknologi informasi, manajemen informasi, dan komunikasi sangat penting dalam memastikan bahwa informasi yang disediakan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.

Selain itu, SDM yang berkualitas juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan. Mereka dapat memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang kebijakan dan program perusahaan, sehingga masyarakat

dapat memahami lebih baik tentang apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam PPID merujuk pada personel yang bertanggung jawab dalam mengelola, menyimpan, dan menyediakan informasi yang dimiliki oleh perusahaan kepada publik. SDM utama PPID perusahaan berasal dari Divisi Sekretariat Perusahaan.

Holding Perkebunan Nusantara telah melakukan beberapa program pengembangan SDM di bidang komunikasi diantaranya:

1. Workshop Komunikasi Publik PTPN”, untuk lebih memahami anatomi media media mainstream maupun media sosial dengan kondisi kekinian yang melibatkan seluruh jajaran Humas atau Komunikasi perusahaan;



2. Partisipasi dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan Kementerian BUMN dan Komisi Informasi Pusat;
3. Aktivasi Program BUMN Muda Perkebunan & Social Media Ranger PTPN Group untuk mendukung upaya diseminasi informasi terkait aksi-aksi korporasi kepada publik. Mereka juga dibekali dengan kompetensi komunikasi karena tidak hanya berasal dari bidang komunikasi.
4. Program Millenials Ber-AKHLAK Bootcamp "The Urge Change Youth Talent" yang juga menekankan pentingnya generasi muda perusahaan dalam menyuarkan aksi-aksi korporasi yang positif kepada publik untuk menambah nilai perusahaan.



Gambar 4. Workshop komunikasi publik PTPN Holding





WISATA AGRO KALIGUA



ANGGARAN PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran penyelenggaraan layanan informasi publik adalah dana yang dikelola oleh perusahaan untuk menyediakan, mengelola, dan mengakses informasi publik. Pada Holding Perkebunan Nusantara, anggaran PPID tersebut termasuk dalam beban anggaran Divisi Sekretariat Perusahaan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Anggaran setiap tahunnya. Untuk beberapa program kerja juga dapat menggunakan beban anggaran unit kerja lain sesuai dengan bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2022, anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk program kerja diantaranya:

1. Pembuatan website <https://holding-perkebunan.com/> berkolaborasi dengan Divisi Teknologi Informasi;
2. Peningkatan kompetensi SDM yang mengelola komunikasi melalui berbagai kegiatan training atau workshop yang menghadirkan pakar komunikasi;
3. Bekerjasama dengan konsultan komunikasi untuk pengelolaan strategi komunikasi dan media sosial perusahaan, khususnya pada periode awal Holding terbentuk;





LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Pengumpulan Daftar Informasi Publik

Dalam tahapan pengumpulan daftar informasi publik, PPID Holding Perkebunan telah menginventarisasi informasi dari seluruh divisi perusahaan dan mengelompokkannya berdasarkan kategori informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Selama proses pengumpulan ini, PPID melakukan asistensi untuk memastikan prosesnya sesuai dengan ketentuan berlaku. Perusahaan telah mengesahkan Daftar Informasi Publik dan tersedia pada link <https://holding-perkebunan.com/informasi-publik/>

Selanjutnya, sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik yang berlaku bahwasannya Daftar Informasi Publik perlu dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali, maka pada triwulan pertama tahun 2023 juga akan

dilakukan evaluasi dan pembaharuan kembali Daftar Informasi Publik.

Pengujian Konsekuensi

Holding Perkebunan Nusantara melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan sebelum adanya permintaan informasi publik. Sebelumnya, daftar informasi yang dikecualikan ini diperoleh dari seluruh unit kerja yang telah mengirimkan pertimbangan layak dibuka atau tidak atas seluruh informasi yang dimilikinya. Untuk pemutakhiran selanjutnya juga dapat mengacu pada sistem klasifikasi arsip yang secara umum sudah menggambarkan keseluruhan informasi yang dimiliki perusahaan.

Pertimbangan tersebut diatas didasarkan utamanya menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 Bab V Pasal 17 tentang



Informasi yang Dikecualikan. Selain itu juga disesuaikan dengan berbagai peraturan terkait lainnya baik dari internal maupun eksternal perusahaan seperti Peraturan Menteri. Selanjutnya PPID dan perangkatnya yang juga melibatkan Pejabat dari Unit

Hukum dan Arsip untuk melakukan Uji Konsekuensi. Daftar Informasi yang Dikecualikan PTPN III Holding tersedia pada link <https://holding-perkebunan.com/informasi-publik/>.



Gambar 7. Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik

Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022, perusahaan menerima permintaan informasi sebanyak 32 permintaan yang mayoritas berasal dari instansi pemerintahan dan swasta. Permintaan ditujukan ke email sekretariat@holding-perkebunan.com dan secara keseluruhan telah ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu. Adapun jenis informasi yang diminta diantaranya terkait keuangan, operasional perusahaan, SDM, Hukum, dan lain-lain sebagaimana grafik berikut ini.



Grafik 1. Jumlah permintaan informasi publik tahun 2022

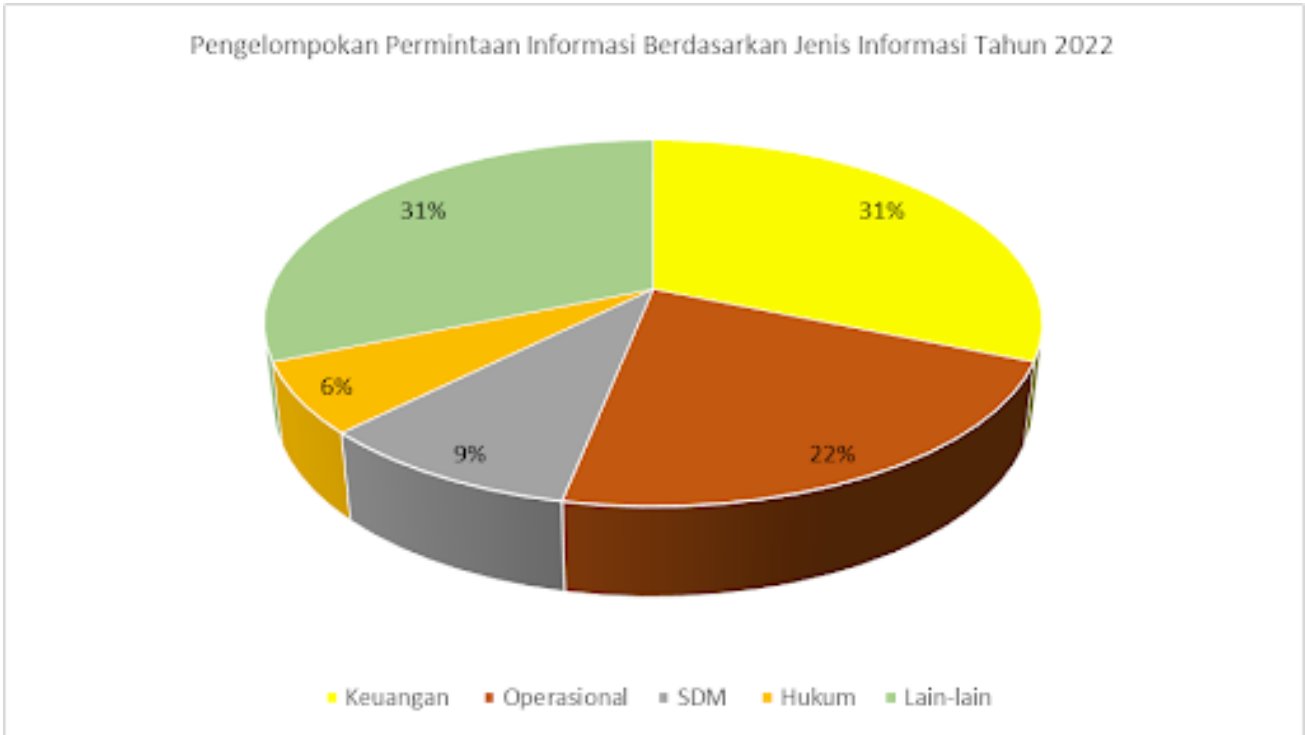


Diagram 1. Jenis Informasi yang diminta tahun 2022

Dari grafik dan diagram di atas, terlihat bahwa permintaan tertinggi terjadi pada bulan triwulan IV 2022. Untuk jenis informasinya, mayoritas pemohon

membutuhkan informasi terkait keuangan, hukum, dan diikuti dengan informasi lain-lain sesuai daftar rincian berikut.

Tabel 1. Daftar Jenis Permintaan Informasi Selama Tahun 2022

Pemohon Informasi	Hal
Kementerian BUMN	Permintaan Data Pendukung Company Profile BUMN
KBUMN RI	Permintaan Data KJPP dan KKA BUMN
KBUMN RI	Permintaan Data Dilumen PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)
Unilever	Tanggapan Permintaan Data Kebutuhan BioCNG dan BioHidrogen
Kementerian Pertanian	Permintaan Data Taksasi Awal Giling 2022
Kementerian Pertanian	Permintaan Data Realisasi Giling dan Stok GKP Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H
Kemntrian BUMN RI	Permintaan Data Proyek Strategis Nasional BUMN
Kemntrian BUMN	Permintaan Data Struktur Organisasi Unit TJSL
Kemntrian BUMN	Penyampaian Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dan Permintaan Data Anggaran Belanja Pengadaan Barang/Jasa Produk Dalam Negeri Tahun 2022
Kemntrian BUMN	Permintaan Data Rating BUMN
Asosiasi Gula Indonesia	Permintaan Data Produksi Gula Tahun 2022
KBUMN RI	Permintaan Data Hutang Pendanaan BUMN Triwulan I 2022



Pemohon Informasi	Hal
Kementerian Perdagangan RI	Permintaan Data terkait Jawaban Kuesioner Pemerintah Indonesia pada Penyelidikan Anti-Subsidi Produk Datty Acid oleh Uni Eropa
KBUMN	Permintaan Data Hirarki/ Struktur BUMN Group Terbaru
Kementerian Perdagangan	Permintaan Data Tambahan
KBUMN	Permintaan Data Proyek Strategis Nasional BUMN s.d. Triwulan II 2022
KSEI	Revisi Permintaan Data Bunga dan Pelunasan Pokok SUKUK IJARAG II Tahun 2019 PTPN III Seri A,D, G ke-12 (dua belas)
Kementerian Perdagangan	Permintaan Data Terkait Kuesioner Input Supplier Pada Penyelidikan Anti-Subsidi Produk Fatty Acid oleh Uni Eropa
Kementerian BUMN RI	Permintaan Data Laporan Daftar Produk Barang/Jasa Substitusi Impor Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Kementerian BUMN RI	Permintaan Data dan/atau Penjelasan Mengenai Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset PTPN III (Persero) Kebun Membang Muda Seluas 1, 12 Ha
Kementerian BUMN RI	Permintaan Data dan/atau Penjelasan Mengenai Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset PTPN III (Persero) Kebun Tanah Raja Seluas 0,5 Ha
KBUMN RI	Permintaan Data Tindak Lanjut atas Optimalisasi Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN
KBUMN RI	Permintaan Data Aset BUMN Grup Yang Masuk Ke Dalam Obyek Vital Nasional
BPKP	Permintaan Data Dalam Rangka Reviu Program Strategis Nasional Pada PTPN Grup Melalui Hilirisasi Industri Kelapa Sawit (Palm Co)
Kementerian BUMN RI	Permintaan Data dan/atau Penjelasan Mengenai Rencana Kerja Sama Bangun Guna Serah (BOT) Pembangunan BioCNG Plant antara PT Perkebunan Nusantara IV dan PT KIS Biofuels Indonesia
Kementerian BUMN RI	Permintaan Data Investasi Teknologi Informasi BUMN
Kementerian BUMN RI	Permintaan Data Rencana Kebutuhan Rekrutmen Pegawai Grup BUMN Batch 2 Tahun 2022
Kementerian Pertanian	Surat Permintaan Data Evaluasi Akhir Giling Tahun 2022
Badan Pemeriksa Keuangan RI	Permintaan Data Terkait Dukungan BUMN Dalam Kegiatan Persiapan Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara
KBUMN RI	Permintaan Data Produk Impor Dalam Pengadaan Barang/Jasa
AGI	Permintaan Data Produksi Gula Giling Tahun 2021 Posisi Akhir Giling dan Stock Gula per 30 Oktober 2021
RPN	Permintaan Data Profil Perusahaan

Keberatan Informasi

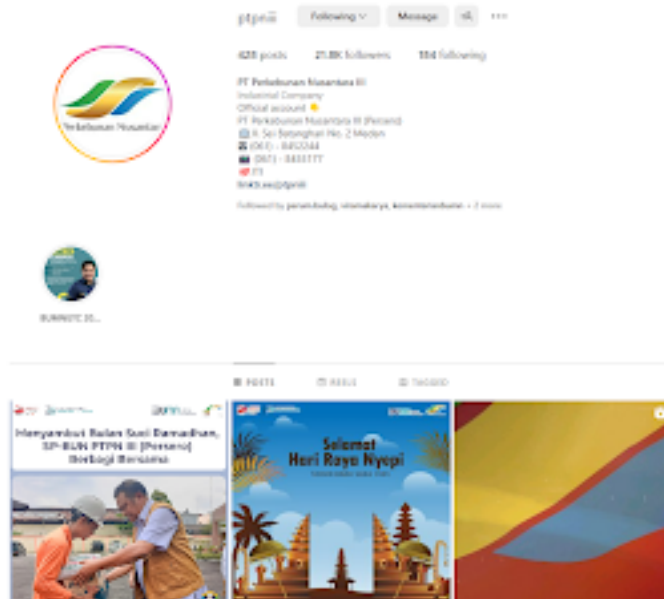
Selama tahun 2022 tidak terdapat pemohon informasi yang mengajukan keberatan atau merasa tidak puas dengan informasi yang sudah diberikan oleh PPID Holding Perkebunan Nusantara, baik secara tertulis maupun lisan.

Konten Keterbukaan Informasi Pada Media Sosial

Sebagai perusahaan Holding, perusahaan dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial sebagai media diseminasi informasi yang

efektif dan efisien. Media sosial perusahaan diantaranya :



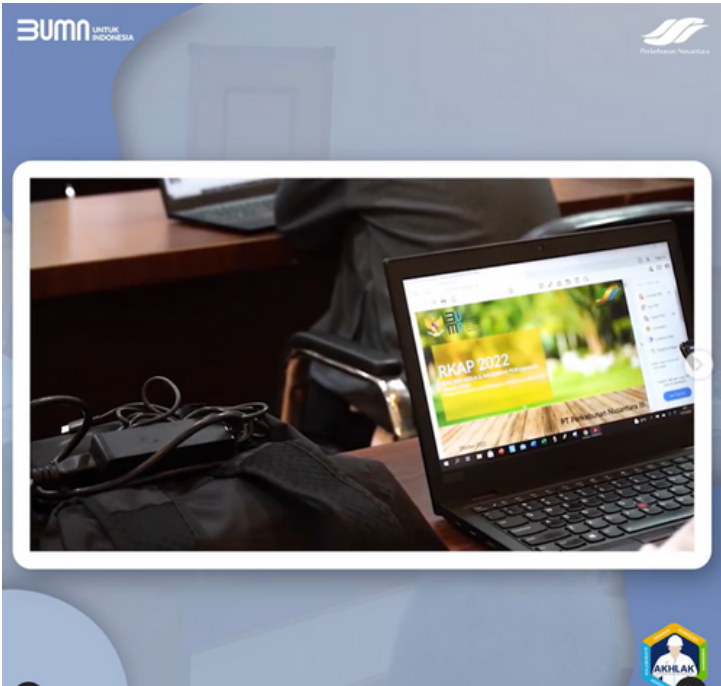


Gambar 8. Akun Instagram Holding Perkebunan

Khusus untuk media Instagram, perusahaan telah mempublikasikan konten media sosial sebanyak 95 informasi selama tahun 2022. Beberapa konten terkait keterbukaan informasi diantaranya sebagai berikut:

1. Informasi terkait gambaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022;
2. Informasi terkait perkembangan kinerja perusahaan;
3. Informasi serta merta terkait rekrutmen perusahaan;
4. Informasi implementasi Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) dan akses pelaporan bagi publik;
5. Informasi serta merta penatausahaan program Pendanaan UMK terkait Angsuran Belum Teridentifikasi
6. Informasi penyaluran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara berkala
7. Informasi berkala terkait transformasi EBITDA perusahaan

Dalam proses pengumpulan materi konten media sosial, Divisi Sekretariat Perusahaan senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh divisi perusahaan, termasuk juga kantor cabang untuk memastikan pesan-pesan yang akan disampaikan sesuai dengan tujuan dan target audiens perusahaan.



ptpniii

ptpniii Hai #SahabatPerkebunan

Rabu, 18 Oktober 2021
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) beserta PTPN IV dan PTPN V melaksanakan rapat teknis RKAP 2022 yang diselenggarakan di Gedung Aula Sawit PT Perkebunan Nusantara (Persero).

Rapat tersebut dibuka oleh Bapak Rachman Ferry Isfianto Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN, selanjutnya arahan umum dari Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Bapak Mohammad Abdul Ghani.

Pada acara tersebut, juga dipaparkan dari DIRKEU terkait PTPN Tranche Hijau, dan dihadiri oleh seluruh Direktur Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Persero, Direktur PTPN IV, Direktur PTPN V, Seluruh SEVP PTPN III, SEVP PTPN IV, SEVP PTPN V, Direktur Sri Pamela, Direktur PT Nabati Lestari (INL), Direktur Kawasan Industri Nusantara (KINRA), PT Industri Karet Nasional (IKN), Direktur PT Sarana Agro Nusantara (SAN), Kepala

Liked by holdingperkebunan and 221 others

OCTOBER 22, 2021

Gambar 9. Konten terkait gambaran RKAP perusahaan tahun 2022



ptpniii

ptpniii Hai #SahabatPerkebunan, kami ingin mempromosikan kepada seluruh teman-teman Perkebunan Nusantara Group tentang apa itu Transformasi EBITDA.

Dalam Transformasi EBITDA, ada 6 Program yang akan kita laksanakan. Tetapi, kita perkenalkan dahulu 3 program awal yang ada dalam Transformasi EBITDA, yaitu :

- 1. Optimalisasi Penjualan (Revenue Enhancement)
- 2. Sensitisasi Manajemen Kinerja Operasional (Operational Control System) dan
- 3. Optimalisasi Biaya Angkut (Logistic Optimization)

Bagaimana, sudah cukup paham?
Bantukan, info tentang 6 Program lainnya ya.
#SahabatPerkebunan

@kementerianbumn
@holdingperkebunan

#EBITDAinformation
#PTNUsers
#KinerjaPTNManfaat
#PerkebunanNusantara
#bumnsumahindonesia
#KebudayaanIndonesia
#CovidCareBUMN
#PTNManajemen

0 To : dan transformasi

2.000 views

OCTOBER 14, 2021

Gambar 10. Informasi terkait transformasi EBITDA perusahaan secara berkala



Kategori	June 2020	June 2021
Aset	130,00 T	135,84 T
Revenue	13,54 T	21,26 T
Net Profit	1,43 T	-1,13 T
EBITDA	2,22 T	5,46 T

Strategi manajemen Holding PTPN melakukan transformasi meliputi tiga strategi utama: Optimisasi Portfolio & Operational Excellence, Commercial Excellence & Ekspansi Hilir dan Optimisasi Aset & Kamitran Strategis dan dua strategi pendukung yaitu: Pengembangan Kapabilitas dan Budaya & Peningkatan System dan Teknologi membuat kinerja hampir disetiap aspek menghasilkan pencapaian menggembirakan.

142 likes
AUGUST 26, 2021

Gambar 11. Konten terkait perkembangan kinerja perusahaan

REKRUTMEN
Perkebunan Nusantara Group

Informasi Lengkap Pendaftaran :
<https://rekrutmen.lpp.co.id/ptpngroup/>

PERIODE REGISTRASI :
Rentang Tanggal
5-14 Oktober 2021

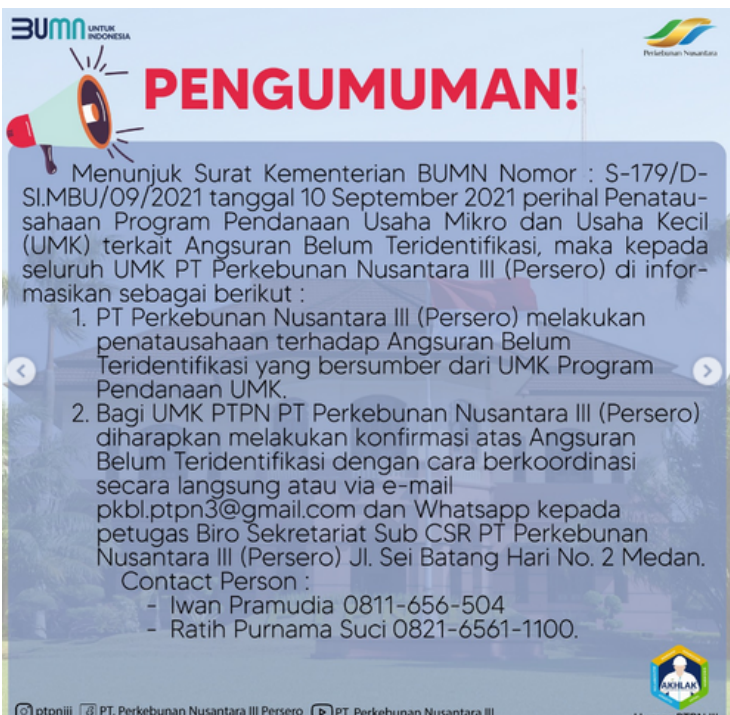
CALL CENTER : (0274) 523071 WA : 0812 7542 4137, 0857 7018 3810
Email: act@lpp.co.id | Senin s.d Jumat 07.15 - 16.00 WIB

1,259 others
OCTOBER 5, 2021

Gambar 12. Informasi serta merta terkait rekrutmen perusahaan



Gambar 13. Konten terkait implementasi Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) dan akses pelaporan bagi publik



Gambar 14. Informasi serta merta penatausahaan program Pendanaan UMK terkait Angsuran Belum Teridentifikasi



Gambar 15. Informasi penyaluran program TJSL secara berkala

Program Kolaborasi Informasi

Kolaborasi antar instansi sangat penting dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, salah satunya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi publik. Kolaborasi dapat membantu memastikan bahwa informasi tersebut tersedia di banyak tempat dan dalam berbagai format, yang dapat memudahkan masyarakat untuk menemukan dan mengakses informasi perusahaan. Selain itu juga dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi. Ini dapat membantu memastikan bahwa informasi publik yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang maksimal.

Selama tahun 2022 perusahaan telah melakukan berbagai kolaborasi informasi di media sosial khususnya yang memang merupakan media yang paling banyak

digunakan saat ini. Hingga bulan Maret 2023, tercatat media Instagram Holding Perkebunan Nusantara sudah memiliki follower atau pengikut sebanyak 21,8 ribu orang.

Beberapa kolaborasi tersebut diantaranya:

1. PTPN mendukung sosialisasi penyelenggaraan event G20 bersama Pemerintah dan seluruh BUMN;
2. Sosialisasi program-program Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Pulau Sumatera : Sub Tim Danau Toba bersama BUMN sektor transportasi, pariwisata, dan lain sebagainya;
3. Campaign event The 11th ASEAN Para Games Solo 2022 bersama Pemerintahan dan seluruh BUMN;
4. Glorifikasi Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara 2022 bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



5. Glorifikasi program UMKM Go Online bersama Kementerian BUMN dan seluruh BUMN;
6. Campaign peningkatan awareness terhadap bahaya covid-19 bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan;
7. Campaign Vaksinasi Gotong Royong bersama PT Kimia Farma Diagnostika



Gambar 16. PTPN akan menjadi bagian yang mendukung penuh semangat Presidensi #G20Indonesia untuk dunia yang lebih baik



Gambar 17. Glorifikasi Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Pulau Sumatera : Sub Tim Danau Toba.



Gambar 18. Meningkatkan awareness tentang covid-19 bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan







CAPAIAN TAHUN 2022

Selama tahun 2022, PPID Holding Perkebunan Nusantara telah mengupayakan percepatan pembentukan PPID, perangkat pendukung, dan fasilitasnya. Perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dan telah menyelesaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembaharuan Daftar Informasi Publik Perusahaan
2. Pembaharuan Daftar Informasi yang Dikecualikan
3. Pembaharuan Maklumat Layanan Informasi Publik
4. Pembuatan website holding-perkebunan.com yang juga mencantumkan terkait KIP dengan alamat <https://holding-perkebunan.com/profil-ppid/>
5. Pembuatan konten-konten pemenuhan website yang terdiri dari informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi tersedia setiap saat.

6. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat

Selanjutnya, PPID akan terus melakukan perbaikan guna mendukung tujuan sebagai perusahaan yang informatif.





KENDALA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya mencapai visi untuk Menjadi Badan Usaha Milik Negara yang memiliki, memproduksi, mengelola dan mempublikasikan informasi publik yang dikuasai guna menciptakan pelayanan informasi terbaik dan menjadi nilai tambah perusahaan, PPID menghadapi beberapa kendala diantaranya:

- a. Perusahaan belum memiliki sarana pendukung layanan informasi berbasis teknologi terkini seperti misalnya mobil application, sehingga mengurangi keterjangkauan khususnya terhadap generasi milenial;
- b. Kurangnya awareness publik atau masyarakat akan eksistensi layanan PPID sehingga permintaan informasi belum banyak ditujukan melalui media komunikasi khusus PPID;
- c. Jumlah SDM khususnya dengan kompetensi komunikasi menjadi kendala yang krusial dan berpengaruh terhadap kualitas layanan informasi;
- d. Tata Kelola PPID yang ada belum menggambarkan secara jelas tentang pembagian tugas dan wewenang di perusahaan;
- e. Kendala terkait keterbatasan anggaran;
- f. Tantangan dalam memastikan akurasi informasi di tengah tuntutan kebutuhan akan kecepatan informasi.



REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN LAYANAN

Dengan melihat beberapa kendala yang dihadapi perusahaan dalam upaya peningkatan layanan informasi publik, perusahaan akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan pengembangan tata kelola PPID yang sesuai ketentuan berlaku dan perkembangan layanan informasi saat ini.
2. Meningkatkan kompetensi SDM Pengelola PPID baik melalui pelatihan maupun benchmark ke Badan Publik yang informatif.
3. Meningkatkan awareness seluruh pegawai terkait eksistensi dan peran PPID sehingga fungsinya dapat dioptimalkan.
4. Melakukan evaluasi sistem dan prosedur secara berkala untuk memastikan program kerja PPID berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Perkebunan Nusantara

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Kantor Pusat:

Gedung Agro Plaza Lt. 15
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1,
Setia Budi, Jakarta Selatan 12950
Telepon: (+62-21) 29183300
Fax: (+62-21) 5203030

Kantor Operasional:

Jl. Sei Batanghari No. 2, Medan 20122
(+62-61) 8452244
(+62-61) 8455177